



# **RANCANGAN AWAL RENJA 2024**



**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK**

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan hidayah yang telah diberikan sehingga Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku Tahun 2024 dapat diselesaikan.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) SKPD Tahun 2024 ini merupakan amanat Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta menjadi dokumen acuan bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku dalam melaksanakan kegiatan guna pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan. Dokumen ini berisi indikator kinerja, program dan kegiatan, target capaian kinerja renstra, realisasi target kinerja program dan kegiatan, target kinerja renja serta indikator kinerja program.

Akhirnya penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku Tahun 2024 dapat terwujud.

Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan rahmat dan hidayah atas setiap usaha kita bersama.

Ambon, Maret 2023

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan  
Perlindungan Anak Provinsi Maluku

**Dra. H.T. Soamole, M.Si**

Pembina utama Muda

NIP. 19650813 1992 09 2 001

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>.....</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>.....</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>.....</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	4
1.4 Sistematika Penulisan .....	5
<b>BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU .....</b>	<b>6</b>
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan capaian Renstra PD .....	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD.....	20
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan fungsi PD .....	26
2.3.1 Tingkat Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Provinsi Maluku.....	33
2.3.2 Permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas PPPA Provinsi Maluku.....	40
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	43
2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat.....	56
<b>BAB III TUJUAN DAN SASARAN.....</b>	<b>60</b>
3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional.....	60
3.1.1 Kebijakan Kementerian PPPA.....	.....
3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja PD Tahun 2024 PD.....	69
<b>BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....</b>	<b>70</b>
4.1 Program dan Kegiatan.....	70
4.2 Kegiatan Prioritas Dinas PPPA Provinsi Maluku.....	73
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>89</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 LATAR BELAKANG**

Berdasarkan Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah. proses Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 terdiri dari 6 (enam) tahapan yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan akhir, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum perangkat daerah/ lintas perangkat daerah, perumusan rancangan akhir, dan penetapan renja.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun Rencana Kerja PD Tahun 2024 sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Rencana Kerja Tahun 2024 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Provinsi Maluku merupakan dokumen perencanaan PD Dinas PPPA Provinsi Maluku untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan RKPD Provinsi Maluku.

Rencana Kerja DP3A Provinsi Maluku Tahun 2024 merupakan Dokumen Perencanaan yang berisi rencana Program Kegiatan yang akan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta sebagai tolak ukur pencapaian kinerja dalam kurun waktu tertentu. Rencana Kerja Tahun 2024 DP3A Provinsi Maluku Tahun 2024 menjabarkan tujuan dan sasaran strategi dan kebijakan serta arah pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, yang mengacu pada Rencana Strategis (RENSTRA) tahun 2019–2024.

Rencana Kerja Tahun 2023 DP3A Provinsi Maluku ini disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun sebelumnya, antisipasi terhadap permasalahan yang dihadapi dengan memperhatikan dinamika perkembangan lingkungan strategis.

Dokumen Rencana Kerja Rancangan awal Tahun 2024 DP3A Provinsi Maluku tahun 2024 berfungsi menerjemahkan, mengoperasikan RKPD ke dalam program dan kegiatan PD sehingga berkontribusi kepada

pencapaian tujuan dan capaian program RKPD secara keseluruhan dan tujuan strategis jangka menengah yang tercantum dalam RENSTRA 2021-2026 mengacu pada RPJMD Provinsi Maluku.

## 1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku tahun anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konversi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women).
3. Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku jo. UU Nomor 46 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat jo. UU Nomor 40 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Barat, Seram Bagian Timur dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku jo. UU Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku jo. UU Nomor 31 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Maluku Barat Daya dan UU Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Buru Selatan di Provinsi Maluku.
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
11. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
12. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.
13. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
14. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial
15. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Perlindungan anak.

16. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
17. Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan.
18. Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
19. Peraturan Pemerintah RI Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar.
20. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kerja Instansi Pemerintah.
21. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009.
22. Peraturan Presiden No. 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
23. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial.
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pembentukan Komisi Penanggulangan Aids dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka Penanggulangan HIV dan AIDS di Daerah.
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pengarusutamaan Gender di Daerah.
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan Komite Aksi Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak.
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
28. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis KLA Tingkat Provinsi.
29. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis KLA Petunjuk Teknis KLA di Desa/Kelurahan.
30. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak.
31. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pembentukan Forum Anak
32. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten /Kota Layak Anak Forum Anak.
33. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator KLA
34. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten /Kota Layak Anak.
35. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Evaluasi KLA.
  36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2011 Tentang Penyediaan Makanan Tambahan Bagi Anak Sekolah.
  37. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Panduan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Berbasis Masyarakat dan Komunitas.
  38. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Kebijakan sekolah Ramah Anak.
  39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi rancangan Peraturan daerah tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah , Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
  40. Peraturan Kementrian Kesejahteraan Rakyat RI Nomor 07 Tahun 2014 Tentang rencana aksi Nasional Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial.
  41. Peraturan Kementrian Kesejahteraan Rakyat RI Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Kelompok Kerja Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial.
  42. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 02 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Pemerintah Daerah Maluku Tahun 2005-2025.
  43. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak.
  44. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor ... Tahun 20.. Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah Daerah Maluku Tahun 2019-2024.
  45. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 06 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga- Lembaga Teknis Daerah Provinsi Maluku

## **MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku Tahun 2024, sebagai dokumen perencanaan tahunan yang memberikan arah untuk mencapai tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan berdasarkan RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2019-2024, dan RENSTRA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku Tahun 2019

– 2024.

Tujuan disusunnya Rencana Kerja (RENJA) Dinas PPPA Provinsi Maluku adalah untuk pencapaian target pembangunan dalam dokumen RKPD tahun 2024.

### **1.3 SISTEMATIKA PENULISAN**

Dokumen Rencana Kerja Tahun 2024 DP3A Provinsi Maluku disusun dalam sistematika sebagai berikut :

#### **KATA PENGANTAR**

#### **DAFTAR ISI**

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Berisi Latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan

#### **BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

Berisi tentang evaluasi pelaksanaan Ranwal RENJA PD tahun lalu dan capaian Renstra perangkat daerah, Analisis kinerja pelayanan PD, Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD, Review terhadap rancangan akhir RKPD, serta Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

#### **BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

Berisi tentang telaahan terhadap kebijakan nasional serta tujuan dan sasaran Ranwal RENJA PD

#### **BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Berisi tentang penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan akhir RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya, serta tabel rencana program dan kegiatan

#### **BAB V PENUTUP**

Berisi uraian penutup berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

## BAB II

### HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

#### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Ranwal Renja PD Tahun lalu dan capaian Renstra PD

Dokumen Rencana Awal Kerja Tahun 2024 DP3A disusun berdasarkan analisa kondisi objektif permasalahan pembangunan saat ini, analisa kondisi objektif diharapkan dapat memberikan gambaran permasalahan yang dihadapi PD. Gambaran permasalahan tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan pemahaman besarnya tantangan yang dihadapi perangkat daerah saat ini serta estimasi kondisi yang akan datang.

Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan rencana kerja tahun lalu dan perkiraan capaian pada tahun berjalan pada bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Provinsi Maluku tahun 2023 dapat dijadikan sebagai tolak ukur untuk evaluasi program dan kegiatan tahun 2023. Evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Ranwal RENJA Tahun 2024 DP3A dijabarkan pada Tabel T-C.29

Tabel T-C.29

## Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rancangan Awal Renja PD dan Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2023

## PD : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan Output	Target kinerja Capaian Program Renstra Perangkat Daerah 2022	Realisasi Target Kinerja/Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 (tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan (Renja Perangkat Daerah (tahun n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (tahun n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021 (tahun n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun (tahun 2022 berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Targets/d Tahun (%)
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2</b>	<b>URUSAN WAJIB (NON PELAYANAN DASAR)</b>									
<b>2.02</b>	<b>Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>									
<b>2.02 . 01</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>									
2.02 . 01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	4						
2.02 . 01.002	<b>ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH</b>									
2.02 . 01.006	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25	25						
2.02 . 01.007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan	4	4						

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan Output	Target kinerja Capaian Program Renstra Perangkat Daerah 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 (tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan (R enja Perangkat Daerah (tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (tahun n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021 (tahun n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun (tahun 2022 berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Targets/d Tahun (%)
		Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD								
2.02 . 01.008	<b>ADMINISTRASI UMUM PARANGKAT DAERAH</b>									
2.02 . 01.009	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket						
2.02 . 01.010	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket						
2.02 . 01.011	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket						
2.02 . 01.012	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket						
2.02 . 01.013	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket						

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan Output	Target kinerja Capaian Program Renstra Perangkat Daerah 2022	Realisasi Target KinerjaHasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 (tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program danKeluaran Kegiatan Tahun lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan(R enja Perangkat Daera(tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (tahun n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021 (tahun n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun (tahun 2022 berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Targets/d Tahun (%)
2.02 . 01.015	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan						
2.02 . 01.017	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen						
	<b>PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH</b>									
	Penngadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kerndaraan Dinas Jabtan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit						
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Paket	5 Paket						
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	16 Unit	16 Unit						

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan Output	Target kinerja Capaian Program Renstra Perangkat Daerah 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 (tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan (R enja Perangkat Daerah (tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (tahun n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021 (tahun n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun (tahun 2022 berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Targets/d Tahun (%)
	<b>PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>									
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan						
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan						
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan						
	<b>PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>									
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara	5 Unit	5 Unit						

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan Output	Target kinerja Capaian Program Renstra Perangkat Daerah 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 (tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan (R enja Perangkat Daerah (tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (tahun n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021 (tahun n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun (tahun 2022 berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Targets/d Tahun (%)
		dan dibayarkan Pajaknya								
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	5 Unit						
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	20 Unit						
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit						
	<b>PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>	IPG (Indeks Pembangunan Gender)	93,25	93.19						
	<b>PELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) PADA LEMBAGA PEMERINTAH KEWENANGAN PROVINSI</b>									
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan	20 Perangkat Daerah	20 Perangkat Daerah						

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan Output	Target kinerja Capaian Program Renstra Perangkat Daerah 2022	Realisasi Target KinerjaHasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 (tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program danKeluaran Kegiatan Tahun lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan(R enja Perangkat Daera(tahun n n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (tahun n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021 (tahun n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun (tahun 2022 berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Targets/d Tahun (%)
		Pelaksanaan Pengarustamaa n Gender (PUG) termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Provinsi								
	<b>PEMBERDAYAAN PEREMPUAN BIDANG POLITIK, HUKUM, SOSIAL, DAN EKONOMI PADA ORGANISASI KEMASYARAKATAN KEWENANGAN PROVINSI</b>									
	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan Di Bidang Politik, Hukum, Sosial Dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	5 Dokumen	5 Dokumen						
	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>	Rasio kekerasan terhadap perempuan	21,87							
	<b>PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN YANG MELIBATKAN PARA PIHAK LINGKUP DAERAH PROV. &amp; LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>									

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan Output	Target kinerja Capaian Program Renstra Perangkat Daerah 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 (tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan (R enja Perangkat Daerah (tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (tahun n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021 (tahun n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun (tahun 2022 berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Targets/d Tahun (%)
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen						
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	3 Perangkat Daerah	3 Perangkat Daerah						
	<b>PENYEDIAAN LAYANAN RUJUKAN LANJUTAN BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN YANG MEMERLUKAN KOORDINASI TINGKAT DAERAH PROVINSI DAN LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>									
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan	3 Layanan	3 Layanan						

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan Output	Target kinerja Capaian Program Renstra Perangkat Daerah 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 (tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan (R enja Perangkat Daerah (tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (tahun n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021 (tahun n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun (tahun 2022 berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Targets/d Tahun (%)
		Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi								
	<b>PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN KEWENANGAN PROVINSI</b>									
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	11 Orang	11 Orang						
	<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA</b>	Persentase lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga yang aktif	65	58.74						
	<b>PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA DALAM MEWUJUDKAN KESETARAAN GENDER (KG) DAN HAK ANAK</b>									

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan Output	Target kinerja Capaian Program Renstra Perangkat Daerah 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 (tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan (R enja Perangkat Daerah (tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (tahun n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021 (tahun n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun (tahun 2022 berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Targets/d Tahun (%)
	<b>KEWENANGAN PROVINSI</b>									
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	20 Perangkat Daerah	20 Perangkat Daerah						
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK</b>									
	<b>PENGUMPULAN, PENGOLAHAN ANALISIS DAN PENYAJIAN DATA GENDER DAN ANAK DALAM KELEMBAGAAN DATA DI TINGKAT DAERAH PROVINSI</b>									
	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia	1 Dokumen	1 Dokumen						
	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam	1 Dokumen	1 Dokumen						

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan Output	Target kinerja Capaian Program Renstra Perangkat Daerah 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 (tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan (R enja Perangkat Daerah (tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (tahun n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021 (tahun n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun (tahun 2022 berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Targets/d Tahun (%)
		Kelembagaan Data Provinsi								
	<b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b>	Kabupaten/Kota yang memenuhi kualifikasi layak anak	45.45	18.8						
	<b>PELEMBAGAAN PHA PADA LEMBAGA PEMERINTAH, NON PEMERINTAH, DAN DUNIA USAHA KEWENANGAN PROVINSI</b>									
	Advokasi Kebijakan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	1 Organisasi	1 Organisasi						
	<b>PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PENINGKATAN KUALITAS HIDUP ANAK KEWENANGAN PROVINSI</b>									

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan Output	Target kinerja Capaian Program Renstra Perangkat Daerah 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 (tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan (R enja Perangkat Daerah (tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (tahun n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021 (tahun n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun (tahun 2022 berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Targets/d Tahun (%)
	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	25 Orang	25 Orang						
	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	2 Dokumen	2 Dokumen						
	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen						

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan Output	Target kinerja Capaian Program Renstra Perangkat Daerah 2022	Realisasi Target KinerjaHasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 (tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program danKeluaran Kegiatan Tahun lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan(R enja Perangkat Daera(tahun n n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (tahun n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021 (tahun n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun (tahun 2022 berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Targets/d Tahun (%)
	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>	Rasio kekerasan terhadap anak	2,43							
	<b>PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP ANAK YANG MELIBATKAN PARA PIHAK LINGKUP DAERAH PROVINSI DAN LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>									
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Organisasi yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	11 Organisasi	11 Organisasi						
	<b>PENYEDIAAN LAYANAN BAGI ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS YANG MEMERLUKAN KOORDINASI TINGKAT DAERAH PROVINSI</b>									
	Penyediaan Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan layanan pengaduan	25 Orang	25 Orang						

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan Output	Target kinerja Capaian Program Renstra Perangkat Daerah 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 (tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) (tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (tahun n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021 (tahun n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun (tahun 2022 berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Targets/d Tahun (%)

Ambon, Maret 2023  
KEPALA DINAS,



Dra. H. T. Soamole, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196508131992092001

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD

Analisis Kinerja pelayanan Perangkat Daerah (PD) Merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas PPPA Provinsi Maluku berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM sesuai Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan, maupun terhadap IKK yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dimana didalamnya diterangkan jenis indikator yang dikaji serta ketentuan peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsi DP3A Provinsi Maluku

Untuk menganalisa kinerja pelayanan DP3A Provinsi Maluku digunakan beberapa indikator, antara lain mengacu pada SPM dan Indikator Kinerja Kunci (IKK), dengan sasaran target sesuai dengan renstra SKPD dan/atau berdasarkan analisis standar kebutuhan pelayanan. Kinerja pelayanan DP3A Provinsi Maluku berdasarkan indikator kinerja antara lain :

1. Pelaksanaan Pemberdayaan Perempuan dalam lingkup Pengarusutamaan Gender (PUG)
  - a. Penguatan Kapasitas Jaringan Pengarusutamaan Gender melalui Sosialisasi PUG mengenai konsep gender, Anggaran Responsif Gender (ARG), Pelatihan Fasilitator PUG dan Pelatihan Pendampingan dan Advokasi Penyusunan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG), Pendampingan dan konsultasi penyusunan Renstra/Renja SKPD yang responsif gender
  - b. Integrasi pengarusutamaan gender ke dalam kebijakan utama pembangunan, sebagaimana arah kebijakan pembangunan nasional agar pembangunan yang dilaksanakan di tiap sektor dapat saling berkorelasi dan memberikan manfaat sosial kepada masyarakat (laki-laki maupun perempuan) dengan memperhatikan aspek kesetaraan, keadilan dan keberlanjutan.
2. Pelaksanaan Perlindungan Perempuan dan Anak
  - a. Upaya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan kepada perempuan dan anak yang bersifat pencegahan, pelayanan dan pemberdayaan berupa Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Peraturan daerah ini bersifat spesifik hanya memberikan perlindungan kepada Perempuan dan anak korban dan Gugus Tugas Pencegahan

### Tindak Pidana Perdagangan Orang

- b. Upaya pengembangan lembaga layanan melalui penguatan dan peningkatan kapasitas jaringan serta peningkatan sumber daya manusia yang terlatih melalui berbagai pendidikan dan pelatihan untuk menangani upaya pencegahan dan tindak kekerasan pada perempuan dan anak
  - c. Lembaga layanan untuk perlindungan perempuan dan pemenuhan haknya diantaranya adalah, LSM pemerhati perempuan dan berbagai panti sosial dan pusat rehabilitasi milik Instansi Vertikal.
3. Pelaksanaan Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak
    - a. Ketersediaan data gender dan anak
    - b. Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak
  4. Pelaksanaan Pemenuhan Hak Anak
    - a. Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak
    - b. Kebijakan Pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak antara lain dengan adanya penyusunan rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan pemenuhan hak anak diharapkan mampu menjadi pijakan dalam rangka memperkuat komitmen dan kebijakan perlindungan dan pemenuhan hak anak

### **Pencapaian kinerja Dinas PPPA Provinsi Maluku dapat dilihat pada**

**tabel 2.2** sebagai berikut :

Tabel T.C 30

**Pencapaian Kinerja Pelayanan PD Dinas Pemberdayaan Perempuan  
Perlindungan Anak Provinsi Maluku**

NO	Indikator	Target SPM / Standar Nasional	Target IKK	Target Renstra PD				Realisasi Capaian				Catatan Analisis
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
<b>11</b>	<b>Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>											
1	Persentase ARG Pada belanja Operasi dan Belanja Modal APBD			55	60	52	65	30	45			
2	Kontribusi Perempuan dalam Pekerjaan Upahan di Sektor Non Pertanian				22	23	25	21	5,7			
3	Rasio KDRT				0,36	0,35	0,35	0,37	0,01			
4	Persentase Kabupaten/ Kota yang memenuhi kualifikasi layak anak				45,45	72,72	100	2,27	18,18			
5	Cakupan Kabupaten/Kota mengelola sistim gender dan anak				82	82	91	82	82			
6.	Rasio kekerasan terhadap anak			2,53	0	0	0	0	0			
7	Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur				40	45	50	45	8,23			
8	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban				60	75	75	45	2			

NO	Indikator	Target SPM / Standar Nasional	Target IKK	Target Renstra PD				Realisasi Capaian				Catatan Analisis
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
	kekerasan											
9	Persentase Perempuan di Lembaga Pemerintah			0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Proporsi Perempuan di Lembaga DPR				27,05	27,50	30	26,85	23,26			
11	Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta				45	47	50	43	53,33			
12	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan				44	46	48	42	40,63			
13	Cakupan Perempuan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit terpadu				18	21	25	15	55			
14	Cakupan Perempuan korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh				60	65	70	55	39			

NO	Indikator	Target SPM / Standar Nasional	Target IKK	Target Renstra PD				Realisasi Capaian				Catatan Analisis
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
	tenagan kesehatan terlatih											
15	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi korban kekerasan di unit pelayanan terpadu				60	65	70	55	0,4			
16	Cakupan Penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan Pengadilan atas kasus kekerasan terhadap perempuan				0	0	0	0	89			
17	Persentase Keluarga Sejahtera				55	58	60	53	63,01			
18	Cakupan peremuan korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum				40	45	50	35	45			
19	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan korban kekerasan				30	30	35	25	0,4			

NO	Indikator	Target SPM / Standar Nasional	Target IKK	Target Renstra PD				Realisasi Capaian				Catatan Analisis
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
20	Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO				2%	1,50%	1,50%	2%	19			
21	Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu				40	45	50	30	55			
22	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan				60	60	75	45	2			

### 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi PD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku dibentuk berdasarkan peraturan Gubernur Maluku Nomor 26 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Maluku, dan Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan dibidang pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- b. Melaksanakan Kebijakan dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- c. Pelaksanaan Evaluasi dan pelaporan di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- d. Pembinaan Teknis di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- e. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- f. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;
- g. Pelaksanaan Administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- h. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, mempunyai wewenang sebagai berikut :

1. penetapan kebijakan daerah, koordinasi, fasilitasi dan mediasi pelaksanaan kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) skala provinsi
2. koordinasi dan fasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan,
3. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG skala provinsi ; penyelenggaraan kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan skala provinsi

4. fasilitasi pengintegrasian kebijakan perlindungan perempuan terhadap kekerasan, tenaga kerja, perempuan lansia, perempuan penyandang cacat dan perempuan di daerah konflik skala provinsi ;
5. penetapan dan pelaksanaan kebijakan daerah terhadap kesejahteraan dan perlindungan anak skala provinsi ;
6. fasilitasi pengembangan dan penguatan lembaga atau organisasi masyarakat dan dunia usaha untuk pelaksanaan PUG dan peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak skala provinsi ;
7. koordinasi pelaksanaan sistem informasi gender dan anak skala provinsi;
8. kompilasi data terpilah menurut jenis kelamin, khusus perempuan dan anak skala provinsi menyangkut komunikasi, informasi dan edukasi (KIE);

Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya Dinas PPPA Provinsi Maluku terdapat 2 (dua) hal yang menjadi perhatian, antara lain :

#### Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Secara garis besar permasalahan yang dihadapi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Provinsi Maluku adalah sebagai berikut :

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Identifikasi permasalahan pada pelayanan Dinas PPPA Provinsi Maluku, beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya dapat kita lihat pada Tabel 2.1. di bawah ini :

**Tabel 2.1**  
**Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan**  
**Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Keterbatasan akses terhadap referensi isu gender pada berbagai bidang pembangunan	Belum optimalnya ketersediaan data dan informasi pemberdayaan perempuan	Belum optimalnya sistem pelaksanaan PUG dalam peformulaan dan pelaksanaan kebijakan.
2	Keterbatasan SDM, baik kuantitas dan kualitas yang dapat memberikan bantuan teknis pelaksanaan PPRG di Pemerintah Provinsi dan kabupaten/kota	Kompetensi SDM dan sarana kurang mendukung	Pemahaman dan persepsi SDM aparatur pemerintah provinsi, kabupaten dan kota tentang PUG yang masih terbatas, serta koordinasi antara Dinas PPPA, BAPPEDA, Badan Keuangan Daerah, dan Inspektorat yang masih kurang telah menyebabkan perannya sebagai gender <i>machinery</i> di daerah belum optimal
3	Belum optimalnya penyusunan program dan kegiatan yang responsif gender yang berdampak pada ketersediaan anggaran	Sebagian besar perangkat daerah masih belum memahami dan menyadari pentingnya mengintegrasikan perspektif gender bagi pembangunan daerah	Belum optimalnya monitoring dan evaluasi pelaksanaan PUG, PPRG untuk ARG
4	Data terpilah gender yang belum <i>valid</i> dan <i>update</i> .	Kurang nya koordinasi dalam pengumpulan data antara Kab/Kota dan instansi terkait, mengenai data terpilah Gender dan Anak	Kurang nya SDM yang memahami utk pengumpulan data/ penginputan data Pengumpulan data Gender dan anak belum tersistem dan belum dilaksanakan secara optimal dalam pembangunan di semua sektor
5	Belum terbentuknya Forum Komunikasi Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak beberapa kabupaten/kota	Kurangnya pemahaman dari kabupaten/kota peran dan fungsi untuk pembentukan Forum Komunikasi Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA)	Minimnya anggaran dalam mendukung pembentukan forum di tingkat kabupaten/kota

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
6	Belum terwujudnya Provinsi Maluku Layak Anak	kota Layak Anak dengan capaian yang baru terbentuk pada dua Kabupaten	Kurangnya optimalnya peningkatan kualitas keluarga yang responsif hak anak
			Belum optimalnya partisipasi anak dalam pembangunan
			Belum optimalnya kinerja dan jejaring lembaga masyarakat serta partisipasi masyarakat dalam peningkatan kualitas hidup anak dan keluarga yang responsif hak anak
			Belum optimalnya ketersediaan data dan informasi pemenuhan hak anak
7	Tingginya jumlah korban kekerasan terhadap perempuan dan anak	Kasus kekerasan terhadap perempuan masih tinggi	Belum optimalnya upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak
			Belum optimalnya penanganan perlindungan bagi perempuan dan anak kelompok rentan sebagai upaya pengurangan risiko
			Belum optimalnya kualitas layanan lembaga penyedia layanan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak
8	Belum Terbentuknya UPTD PPA	Proses penanganan masalah kekerasan pada perempuan dan anak belum tertangani secara maksimal.	Penanganan kasus yang kompleks, yang harusnya ditangani secara komprehensif, mengingat fungsi UPTD PPA sebagai rujukan lanjutan.

### Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi, Misi, dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku yang ingin diwujudkan pada periode 2019 -2024 adalah :

#### **VISI :**

**“Maluku Yang Terkelola Secara Jujur, Bersih dan Melayani, Terjamin Dalam Kesejahteraan Dan Berdaulat Atas Gususan Kepulauan ”**

#### **MISI :**

- 1). *Mewujudkan birokrasi yang dinamis, jujur, bersih dan melayani*
- 2). *Meningkatkan kualitas Pendidikan & kesehatan, murah & terjangkau*
- 3). *Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan*

- 4). *Peningkatan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau*
- 5). *Meningkatkan suasana kondusif untuk investasi, budaya, dan pariwisata*
- 6). *Mewujudkan SDM yang profesional, kreatif, mandiri dan berprestasi*

**Mengacu pada** Misi Keenam yaitu “ *Mewujudkan SDM yang profesional, kreatif, mandiri dan berprestasi*”

Dinas PPPA Provinsi Maluku dalam melaksanakan **Misi Keenam** tersebut di atas dan menuangkan ke dalam Rencana Strategis secara komprehensif dan berkelanjutan dalam upaya mencapai keberhasilan kinerja yang akan dicapai selama 5 (lima) tahun serta langkah- langkah strategis untuk mencapai tujuan Dinas PPPA Provinsi Maluku sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Keterkaitan antara tugas dan fungsi Dinas PPPA Provinsi Maluku dengan Visi, Misi, serta Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang akan dipaparkan secara mendetail. Menelaah Visi, Misi, serta Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan DPPPAA provinsi maluku yang dapat mempengaruhi pencapaian visi, misi kepala daerah dan wakil kepala daerah . Hasil dari identifikasi tersebut juga akan menjadi input bagi perumusan isu-isu strategis pelayanan Dinas PPPA Provinsi Maluku Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tercantum pada Tabel 2.2 berikut ini.

Tabel 2.2

**Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan PD  
Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**

<b>VISI</b> “Maluku Yang Terkelola Secara Jujur, Bersih dan Melayani, Terjamin Dalam Kesejahteraan Dan Berdaulat Atas Gususan Kepulauan”					
<b>Misi 6</b> Mewujudkan SDM yang profesional, kreatif, mandiri dan berprestasi					
NO.	PERMASALAHAN PELAYANAN DINAS PPPA	FAKTOR INTERNAL		FAKTOR EKSTERNAL	
		PENGHAMBAT	PENDORONG	ENGHAMBAT	PENDORONG
1	Kesetaraan gender ( <i>gender equality</i> ) merupakan Permasalahan lintas sector ( <i>crosscutting issues</i> ) yang Dilaksanakan melalui Strategi Pengarusutamaan Gender (PUG) Untuk Meningkatkan akses partisipasi control dan manfaat bagi gender. Namun PUG belum menjadi menjadi sasaran utama Dalam Pembangunan mulai dari tingkat desa sampai dengan provinsi	Kompetensi SDM dan sarana kurang mendukung	Adanya Tim Koordinasi antara anggota Pokja PUG dan <i>Focal Point</i> Gender sudah berjalan	Pemahaman terhadap gender dan PUG belum optimal baik dari masyarakat, swasta maupun sektor lain	PUG merupakan strategi dalam Kebijakan Pembangunan di Provinsi Maluku
2	Partisipasi Perempuan di Politik sudah baik akan tetapi Perempuan Pengambilan keputusan dalam jabatan publik masih kurang	Masih adanya diskriminasi terhadap perempuan baik dari usaha maupun penentuan menjadi Pejabat Publik	Kesempatan dan peluang Untuk Perempuan masih tinggi Dengan	Masih adanya diskriminasi dalam memperoleh akses terhadap perempuan dalam pembangunan	Adanya UU No. 12 tahun 2013 tentang Pemilu Yang Mengamanatkan Keterwakilan 30% perempuan di Lembaga Legislatif
3	Banyaknya pelaku ekonomi perempuan di sektor informal yang belum terdata dan cenderung rendah	Masih adanya diskriminasi Dalam memperoleh akses terhadap pendidikan dan pelatihan bagi Kaum perempuan	Koordinasi dan Kerjasama dengan OPD Terkait		

VISI					
“Maluku Yang Terkelola Secara Jujur, Bersih dan Melayani, Terjamin Dalam Kesejahteraan Dan Berdaulat Atas Gususan Kepulauan”					
Misi 6					
Mewujudkan SDM yang profesional, kreatif, mandiri dan berprestasi					
NO.	PERMASALAHAN PELAYANAN DINAS PPPA	FAKTOR INTERNAL		FAKTOR EKSTERNAL	
		PENGHAMBAT	PENDORONG	ENGHAMBAT	PENDORONG
4	Data terpilah gender yang belum <i>valid</i> dan <i>update</i>	Kurang nya SDM yang memahami utk pengumpulan data/ penginputan data	Adanya Tim Penyusun Data Terpilah	Belum semua perangkat daerah mempunyai data terpilah	Dukungan pemerintah daerah dalam keterbukaan informasi publik berbasis aplikasi
5	Pemenuhan Hak Anak yang dituangkan dalam 5 klaster dan 24 Indikator Kabupaten/kota Layak Anak belum dipahami oleh banyak sektor sebagai upaya pemenuhan Hak Anak yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah di semua bidang.	Kompetensi SDM dan sarana kurang mendukung	Adanya Advokasi, sosialisasi serta Koordinasi tentang pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak ke tingkat pusat dan kabupaten/kota	Belum semua sektor memahami pemenuhan hak anak melalui 5 klaster dan 24 indikator	Banyak lembaga masyarakat yang turut ambil bagian dalam PUHA
6	Maraknya kekerasan terhadap perempuan dan anak dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rendahnya pendidikan dan kualitas hidup masyarakat</li> <li>2. Masih adanya pemahaman masyarakat bahwa kekerasan merupakan aib keluarga sehingga mereka enggan melaporkan kasusnya.</li> <li>3. Kurangnya pemahaman masyarakat akan UU perlindungan perempuan dan anak</li> </ol>	Koordinasi dan kerjasama dengan SKPD terkait	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Implementasi Peraturan Perundang-undangan belum optimal</li> <li>2. Belum terbentuknya kelompok masyarakat untuk peduli dan membantu penanganan kasus kekerasan</li> <li>3. Adanya kemajuan teknologi, menyebabkan anak – anak dengan mudanya mengakses <i>social media</i>, yang tidak diimbangi dengan pengawasan dari orang tua</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak</li> <li>2. UU No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan KDRT</li> <li>3. UU No.12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual</li> <li>4. Koordinasi dan kerjasama dengan aparat penegak hukum dan LSM yang menangani perlindungan perempuan dan anak</li> </ol>

<b>VISI</b>					
<b>“Maluku Yang Terkelola Secara Jujur, Bersih dan Melayani, Terjamin Kesejahteraan Dan Berdaulat Atas Gususan Kepulauan dalam”</b>					
<b>Misi 6</b>					
<b>Mewujudkan SDM yang profesional, kreatif, mandiri dan berprestasi</b>					
<b>NO.</b>	<b>PERMASALAHAN PELAYANAN DINAS PPPA</b>	<b>FAKTOR INTERNAL</b>		<b>FAKTOR EKSTERNAL</b>	
		<b>PENGHAMBAT</b>	<b>PENDORONG</b>	<b>ENGHAMBAT</b>	<b>PENDORONG</b>
7	Belum terbentuknya UPTD PPA Provinsi Maluku	Belum tersedianya Fasilitas serta SDM yang masih kurang	Sosialisasi secara berkala tentang keberadaan UPTD PPA Provinsi Maluku	Masih banyak masyarakat yang belum mengetahui adanya unit layanan terhadap kekerasan perempuan dan anak.	UPTD PPA sangat penting dalam proses penanganan kasus kekerasan Perempuan dan Anak

### 2.3.1 Tingkat Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Provinsi Maluku

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas PPPA Provinsi Maluku tahun 2022 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja Dinas PPPA Provinsi Maluku tahun 2022 dengan realisasinya.

Secara umum sasaran strategis yang ditargetkan dapat dicapai, namun demikian masih terdapat beberapa sasaran strategis yang belum mencapai target yang ditetapkan. Terhadap sasaran yang belum mencapai target yang ditetapkan akan dianalisis dan dievaluasi agar dapat dilakukan perbaikan dimasa mendatang. Tingkat capaian kinerja Dinas PPPA Provinsi Maluku tahun 2022 berdasarkan hasil pengukurannya dapat dilihat pada tabel berikut sebagai berikut :

Tabel 2.4.  
Tingkat capaian indikator kinerja Dinas PPPA Provinsi Maluku  
Tahun 2022

No	Indikator kinerja	Satuan		
			Target	Realisasi
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Partisipasi Perempuan di Lembaga Presentase Pemerintah	persen	0	7,75
2	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	persen	27,05	23,26
3	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Rasio	45	32,52
4	Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta	persen	45	53,33
5	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	persen	42	44
6	Kontribusi Perempuan dalam Pekerjaan Upahan di Sektor Non Pertanian	persen	21	22
7	Rasio KDRT	persen	0,37	0,36
8	Cakupan Perempuan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	Persen	15	18

Dalam rangka melaksanakan pelayanan kinerja Dinas PPPA Provinsi Maluku dengan Susunan Organisasinya Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku dan Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku, sebagai berikut :

Kepala Dinas , membawahi 1 ( satu ) Sekretaris dan 4 (empat) Bidang.

a. Sekretaris, membawahi 3 ( tiga ) Sub Bagian :

- Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
- Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
- Sub Bagian Keuangan dan Aset

b. Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga membawahi 2 Seksi yakni :

- Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi dan Kualitas Keluarga
- Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Sosial , Politik dan Hukum

c. Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak membawahi 2 Seksi yakni ::

- Seksi Data, Informasi Gender dan Kekerasan Perempuan
- Seksi Data, Informasi dan Kekerasan Anak

d. Bidang Pemenuhan Hak Anak membawahi 2 Seksi yakni : :

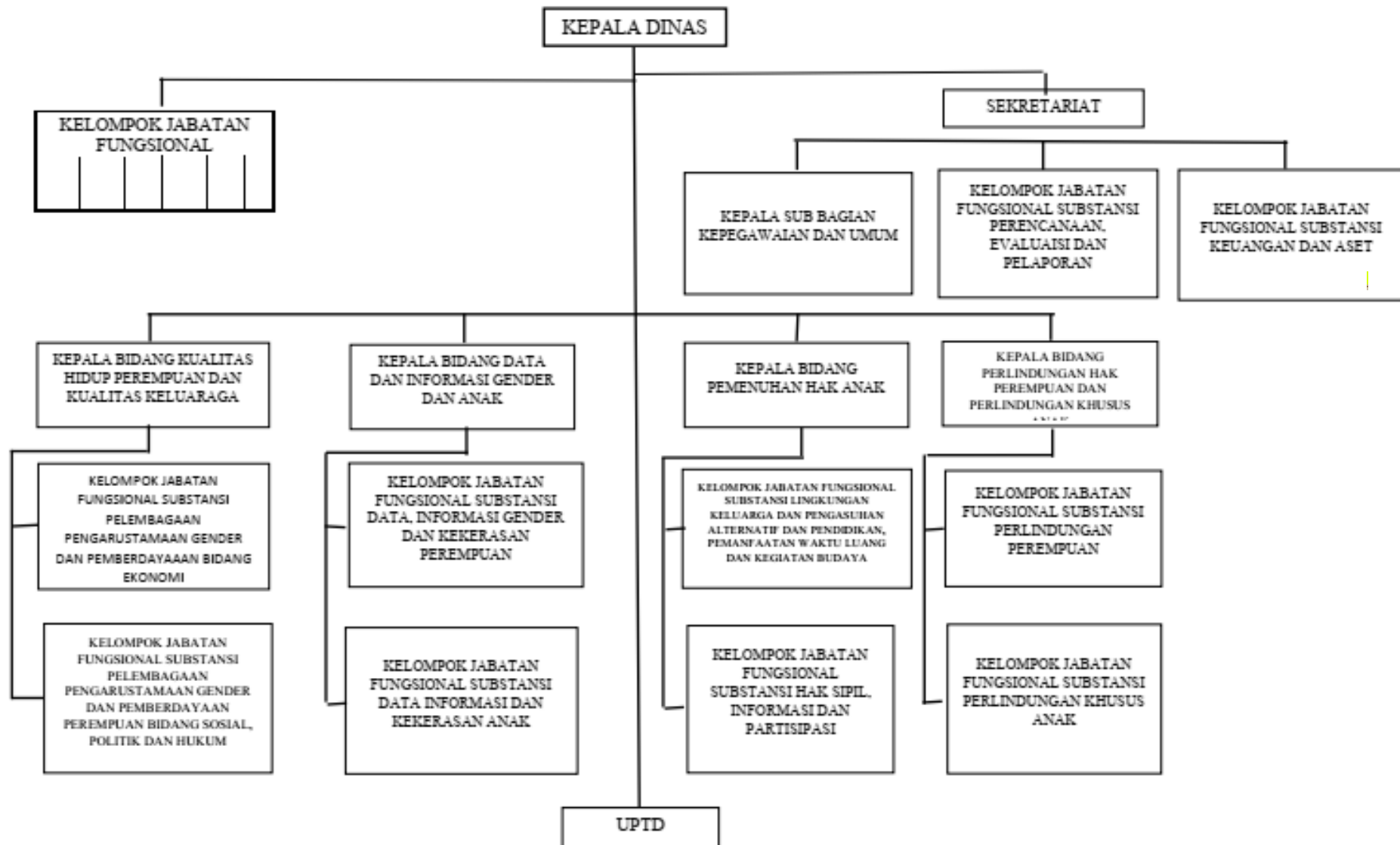
- Seksi Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif dan Pendidikan, Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya; dan
- Seksi Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi

e. Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak membawahi 2 Seksi yakni :

- Seksi Perlindungan Perempuan ; dan:
- Seksi Perlindungan Khusus Anak. Struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku adalah sebagai berikut:

:

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI MALUKU**



## **2.3.2 Permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas PPPA Provinsi Maluku**

### **A. Permasalahan pelaksanaan tugas dan fungsi**

Secara garis besar permasalahan yang dihadapi Dinas PPPA Provinsi Maluku adalah sebagai berikut :

- Masih banyaknya kebijakan operasional pembangunan pemberdayaan perempuan dan anak yang masih perlu ditelaah dan disinergikan;
- Masih kurangnya pedoman dan petunjuk teknis bidang pemberdayaan perempuan dan anak, serta kelembagaan yang mendukung kemajuan perempuan dan anak;
- Masih lemahnya koordinasi baik lintas sektor maupun lintas program dalam rangka pelaksanaan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,
- Masih lemahnya pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, yang mencakup pemberdayaan, kesetaraan, kualitas hidup, perlindungan keadilan dan hak asasi serta kelembagaan yang mendukung kemajuan perempuan dan anak;
- Kurangnya koordinasi dan kerjasama secara internal sehingga beberapa pekerjaan menyangkut data yang berhubungan dengan masing-masing tupoksi tidak bisa dikerjakan dengan cepat;
- Kurangnya fasilitas kerja sehingga pekerjaan yang penting sering tidak bisa dikerjakan dengan cepat bahkan terlambat, sehingga dapat menghambat persiapan maupun pelaksanaan kegiatan;
- Perlunya menanamkan persepsi masyarakat tentang Pengarusutamaan gender, Perlindungan Terhadap perempuan dan anak perlindungan melalui kegiatan penyuluhan, sosialisasi, pelatihan dan pembinaan secara teratur sehingga masyarakat sadar akan pentingnya hal tersebut dalam aspek kehidupan terutama pembangunan yang berkeadilan. Oleh karena itu secara khusus Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga, Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak dan Pemenuhan Hak Anak agar dapat terus berinovasi untuk membuat perencanaan program kegiatan .

## **B. Hambatan pelaksanaan tugas dan fungsi**

- Koordinasi yang masih fersial sehingga menghambat dalam proses pelayan publik;
- Tingkat pemahaman aparaturnya pelaksanaan pelayanan terhadap tugas dan fungsi belum maksimal;
- Inovasi dan kreatifitas dalam melaksanakan tanggung jawab pelayanan tidak berjalan sesuai ketentuan yang berlaku;
- Kepedulian terhadap tugas dan tanggung jawab pelaksanaan tugas yang belum terwujud dengan baik;
- Kurangnya koordinasi dan kerjasama secara internal sehingga beberapa pekerjaan menyangkut data yang berhubungan dengan masing-masing tupoksi tidak bisa dikerjakan dengan cepat;
- Penempatan Pegawai yang tidak sesuai dengan kompetensinya;
- Kurangnya pendanaan dalam pelaksanaan program dan kegiatan

## **C. Dampak terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah**

- Tanggung jawab terhadap kemajuan daerah melalui proses pembangunan yang berkelanjutan akan mengalami proses yang panjang untuk terlaksana.
- Upaya pengawasan terhadap persaingan bebas yang berbasis ekonomi kerakyatan perlu peningkatan
- Jaminan kemudahan sebagai bentuk menciptakan kepercayaan timbal balik pemerintah dan masyarakat belum maksimal dikarenakan hal ini sangat menentukan penilaian masyarakat tentang pelayanan dari aparaturnya negara dan keberhasilan Kepala Daerah khususnya.

## **D. Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas PPPA Provinsi Maluku**

### **Tantangan**

- Dengan adanya Kesenjangan/Ketidaksetaraan sangat penting untuk melakukan review peraturan perundang-undangan agar tidak bias gender dan tidak diskriminasi
- Konflik peran sangat mempengaruhi strategi perlindungan perempuan dan anak
- Disparitas Indeks Pembangunan Gender antar wilayah yang menunjukkan angka yang bervariasi, namun antar Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku hal itu belum maksimal digambarkan/dipetakan.

- Masih tingginya angka kemiskinan merupakan tantangan tersendiri bagi peningkatan IPG
- Meningkatnya kasus kekerasan pada Anak dan Perempuan
- Keterwakilan perempuan dalam politik dan pengambilan keputusan, maupun peran dan partisipasi dalam politik masih belum maksimal, hal ini ditunjukkan dengan rendahnya jumlah perempuan yang menduduki jabatan strategis di berbagai level
- Masih rendahnya keterlibatan lintas sektor dalam Pengarus Utamaan Gender (PUG)
- Belum optimalnya pelaksanaan kebijakan tentang perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi

### **Peluang**

- Menguatnya isu Gender
- Banyaknya dukungan dari masyarakat terhadap program PUG dan PUHA
- Banyaknya jumlah penduduk perempuan yang mendorong banyaknya SDM Perempuan yang potensial
- Tersedianya Organisasi-organisasi yang peduli akan pemberdayaan perempuan
- Segera Dibentuknya UPT Perlindungan Perempuan dan Anak sebagai tempat pelayanan dan perlindungan terhadap perempuan dan Anak
- Banyaknya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), organisasi masyarakat, Perguruan Tinggi, baik negeri maupun swasta, yang memiliki perhatian terhadap masalah perlindungan perempuan dan anak serta remaja

## **E. Isu-isu strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku**

Dari berbagai identifikasi masalah dan hasil telaahan diatas, maka isu strategis dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perindungan Anak lima tahun ke depan, meliputi :

### **Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak**

1. Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan :
  - a. meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan
  - b. meningkatkan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, termasuk TPPO
  - c. meningkatkan efektivitas kelembagaan PUG dan kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan
  
2. Perlindungan Anak :
  - a. meningkatkan akses semua anak terhadap pelayanan yang berkualitas dalam rangka mendukung tumbuh kembang dan kelangsungan hidup
  - b. penguatan sistem perlindungan anak mencakup pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi anak korban tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya
  - c. peningkatan efektivitas kelembagaan perlindungan anak

## **2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Maluku RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana diatur dalam Undang- undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2019-2024 adalah tahapan pertama dalam rangka mewujudkan visi dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Maluku. RPJMD merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis setiap Perangkat Daerah (Renstra PD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahun.

RKPD memuat evaluasi pelaksanaan evaluasi pelaksanaan evaluasi RKPD

tahun lalu, rancangan kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, dan rencana program dan kegiatan prioritas daerah. RKPD pada dasarnya berfungsi sebagai penjabaran RPJMD. Dengan demikian, penyusunan RKPD berpedoman kepada RPJMD, namun tetap mempertimbangkan dinamika permasalahan dan isu-isu pembangunan mutakhir. Capaian kinerja RKPD selama 5 (lima) tahun harus dapat menjawab dan mencapai visi dan misi Kepala Daerah sebagaimana telah dijabarkan dalam RPJMD.

Dengan mengacu kepada RKPD Provinsi Maluku dan Renstra Dinas PPPA Provinsi Maluku maka Dinas PPPA Provinsi Maluku menyusun Rencana Kerja (RENJA) tahun 2024 yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 dengan memperhatikan kepada hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode tahun sebelumnya.

Dalam melaksanakan review rancangan akhir RKPD proses yang dilakukan adalah membandingkan antara rancangan akhir RKPD tahun 202 dengan hasil analisis kebutuhan banyak terdapat perbedaan antara lain :

- Tidak semua kegiatan yang ada dalam rancangan akhir RKPD dapat dilaksanakan
- Terdapat beberapa indikator kinerja yang harus disesuaikan
- Besarnya dana dalam rancangan akhir RKPD
- *Adanya program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di Rencana Akhir RKPD\**

Untuk lebih jelasnya review rancangan RKPD tahun 2024 terhadap hasil analisa kebutuhan pada Dinas PPPA Provinsi Maluku dapat dilihat pada **Tabel T.C 31** sebagai berikut :

**Tabel T-C.31**  
**Review Terhadap Rancangan Awal RKPD tahun**  
**2024 Provinsi Maluku**

**PD : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku**

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Anlisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu (Rp)	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu (Rp)	
	URUSAN WAJIB (NON PELAYANAN DASAR)				7,555,449,475	URUSAN WAJIB (NON PELAYANAN DASAR)				7,555,449,475	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				4,767,873,000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				4,767,873,000	
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
a	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Ambon, Sirimau, Uritet	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	486.809.720	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Ambon, Sirimau, Uritet	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	486.809.720	
b	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2		

No	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu (Rp)	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu (Rp)	
c	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN	Kota Ambon, Sirimau, Uritetu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12	Rp. 3,390,541,130	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN	Kota Ambon, Sirimau, Uritetu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12	Rp. 3,390,541,130	
d	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD (DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK)	Kota Ambon, Sirimau, Uritetu	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		16,326,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD (DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK)	Kota Ambon, Sirimau, Uritetu	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		16,326,000	
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>					<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>					
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK)	Kota Ambon, Sirimau, Uritetu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		63,399,200	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK)	Kota Ambon, Sirimau, Uritetu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		63,399,200	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK)	Kota Ambon, Sirimau, Uritetu	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		26,125,000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK)	Kota Ambon, Sirimau, Uritetu	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		26,125,000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu (DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK)	Kota Ambon, Sirimau,	jumlah Laporan Fasilitasi		58,320,000	Fasilitasi Kunjungan Tamu (DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN	Kota Ambon, Sirimau,	jumlah Laporan Fasilitasi		58,320,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu (Rp)	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu (Rp)	
		Uritetu	Kunjungan Tamu			PERLINDUNGAN ANAK)	Uritetu	Kunjungan Tamu			
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>				<b>23,701,500</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>				<b>23,701,500</b>	
	Pengadaan Mebel (DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK)	Kota Ambon, Sirimau, Uritetu	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		23,701,500	Pengadaan Mebel (DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK)	Kota Ambon, Sirimau, Uritetu	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		23,701,500	
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>491,251,950</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>491,251,950</b>	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat (DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK) Dana Transfer Umum Dana Alokasi U		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		9,192,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat (DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK) Dana Transfer Umum Dana Alokasi U		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		9,192,000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK)	Kota Ambon, Sirimau, Uritetu	jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		75,600,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK)	Kota Ambon, Sirimau, Uritetu	jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		75,600,000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK)	Kota Ambon, Sirimau, Uritetu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		406,459,950	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK)	Kota Ambon, Sirimau, Uritetu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		406,459,950	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu (Rp)	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu (Rp)	
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				235,100,000	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				235,100,000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK)	Kota Ambon, Sirimau, Uritetu	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		86,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK)	Kota Ambon, Sirimau, Uritetu	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		86,000,000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK)	Kota Ambon, Sirimau, Uritetu	jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		41,600,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK)	Kota Ambon, Sirimau, Uritetu	jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		41,600,000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK)	Kota Ambon, Sirimau, Uritetu	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		15,000,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK)	Kota Ambon, Sirimau, Uritetu	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		15,000,000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK)	Kota Ambon, Sirimau, Uritetu	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		92,500,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK)	Kota Ambon, Sirimau, Uritetu	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		92,500,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu (Rp)	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu (Rp)	
	<b>PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>				593,833,138	<b>PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>				593,833,138	
	<b>Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provins</b>				99,822,762	<b>Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provins</b>				99,822,762	
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi (DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK)	Kota Ambon, Sirimau, Uritetu	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Provinsi		99,822,762	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi (DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK)	Kota Ambon, Sirimau, Uritetu	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Provinsi		99,822,762	
	<b>Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi KeMasyarakatan Kewenangan Provinsi</b>				<b>459,704,530</b>	<b>Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi KeMasyarakatan Kewenangan Provinsi</b>				<b>459,704,530</b>	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu (Rp)	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu (Rp)	
	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi (DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK)		Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi		57,228,930	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi (DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK)		Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi			
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi (DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK)		Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mengikuti Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan Di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi Kepada Organisasi Masyarakat di Kabuputaen/Kota		402,475,600	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi (DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK)		Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mengikuti Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan Di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi Kepada Organisasi Masyarakat di Kabuputaen/Kota		402,475,600	
	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi</b>					<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan</b>					

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu (Rp)	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu (Rp)	
						<b>Provinsi</b>					
	Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi (DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi yang Tersedia		34,305,846	Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi (DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi yang Tersedia		34,305,846	
	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>				828,766,250	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>				828,766,250	
	<b>Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota</b>				499,666,250	<b>Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota</b>				499,666,250	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi (DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK)		jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi		109,700,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi (DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK)		jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi		109,700,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu (Rp)	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu (Rp)	
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi (DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi		389,966,250	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi (DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi		389,966,250	
	<b>Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota</b>				254,504,000	<b>Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota</b>				254,504,000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi (DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK)		Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi		254,504,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi (DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK)		Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi		254,504,000	
	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan</b>				74,596,000	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan</b>				74,596,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu (Rp)	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu (Rp)	
	<b>Kewenangan Provinsi</b>					<b>Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi</b>					
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi (DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK)		Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas		74,596,000	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi (DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK)		Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas			
	<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA</b>				175,299,842	<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA</b>				175,299,842	
	<b>Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi</b>				131,025,500	<b>Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi</b>				131,025,500	
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota (DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK)		jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan		131,025,500	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota (DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK)		jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan		131,025,500	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu (Rp)	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu (Rp)	
			Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota					Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota			
	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi</b>				44,274,342	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi</b>				44,274,342	
	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi (DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK)		Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi		44,274,342	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi (DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK)		Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi		44,274,342	
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK</b>				171,999,045	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK</b>				171,999,045	
	<b>Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi</b>				171,999,045	<b>Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi</b>					

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu (Rp)	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu (Rp)	
	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi (DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK)		jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia		111,936,315	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi (DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK)		jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia		111,936,315	
	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi (DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK)		Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi		60,062,730	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi (DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK)		Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi		60,062,730	
	<b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b>				878,112,950	<b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b>				878,112,950	
	<b>Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi</b>				650,125,500	<b>Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi</b>				650,125,500	
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi (DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK)		Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi		350,000,000	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi (DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK)		Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi		350,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu (Rp)	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu (Rp)	
	ANAK)		Dunia Usaha Usaha Kewenangan Provinsi yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha			PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK)		Media dan Dunia Usaha Usaha Kewenangan Provinsi yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha			
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi (DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK)		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi		300,125,500	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi (DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK)		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi		300,125,500	
	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi</b>				227,987,45	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi</b>				227,987,45	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi (DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi		103,598,450	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi (DINAS PEMBERDAYAAN		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi			

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu (Rp)	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu (Rp)	
	PERLINDUNGAN ANAK		Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi			PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi			
	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK)		Jumlah Dokumen Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		124,389,000	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK)		Jumlah Dokumen Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		124,389,000	
	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>				139,565,250	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>				139,565,250	
	<b>Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi</b>				139,565,250	<b>Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi</b>				139,565,250	
	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi (DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK)		Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak		139,565,250	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi (DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK)		Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia		139,565,250	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu (Rp)	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu (Rp)	
			yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi					Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi			

## **2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Forum OPD sebagai sarana dua arah atau wadah organisasi dalam memberikan ruang bagi masyarakat, stakeholders, lembaga dinas/ instansi terkait dalam berdiskusi dan bermusyawarah untuk menyusun dan merencanakan program kerja pembangun untuk tahun 2023. Sebagai OPD yang menangani dan terkait terhadap isu-isu strategis pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku didiskusikan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja. Pada forum OPD terdapat usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada Dinas PPPA Provinsi Maluku selaku Perangkat Daerah baik dari kelompok masyarakat, LSM, dan SKPD kabupaten. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan.

Usulan tersebut dapat dilihat pada tabel 2.6

**Tabel 2.6**  
**Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Tahun 2024**

No.	Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Sumber Usulan	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>						
1	<p>2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</p> <p>2.08.03.1.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi</p> <p>2.08.03.1.03.04 - Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>2.08.03.1.01 - Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi</p> <p>2.08.03.1.01.02 - Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan</p>	Provinsi Maluku	Jumlah Dokumen	1		Penanganan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak di Provinsi Maluku
2	<p>2.08.04 - PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA</p> <p>2.08.04.1.03 - Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>2.08.04.1.03.01 - Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota</p>	Provinsi Maluku	Jumlah Kegiatan	1		Peningkatan Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan Dan Anak ( PUSPA )



## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**

##### **3.1.1 Kementerian PPPA**

Kementerian PPPA merupakan bagian dari Kabinet Kerja periode 2019–2024 yang akan melaksanakan agenda kerjanya berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2019–2024. RPJMN merupakan himpunan dari aspirasi rakyat dan penjabaran dari Visi dan Misi Presiden RI yang telah dijanjikan pada masa kampanye Pemilu Presiden RI pada tahun 2019.

##### **Visi Kementerian PPPA**

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi Presiden tahun 2020-2024 yaitu: "Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong". Untuk mewujudkan visi Presiden tersebut, ditempuh 9 (sembilan) misi, yaitu sebagai berikut:

1. peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
7. perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan
9. sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Visi Kemen PPPA harus memperhatikan visi dan misi Presiden. Memperhatikan visi Presiden terpilih tersebut, maka Kemen PPPA sesuai dengan tugas dan fungsinya menetapkan visi Kemen PPPA tahun 2020-2024 yaitu: "Kementerian yang PEDULI (Profesional, Ekuil, Dedikasi, Unggul, Loyal, dan Integritas) dalam mewujudkan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong-Royong".

## Misi Kementerian PPPA

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Penyusunan misi Kemen PPPA Tahun 2020-2024 disusun dengan mengacu pada misi Presiden nomor 1 (Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia), 3 (Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan), dan 6 (Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya).

Dalam rangka mewujudkan visi Kemen PPPA, ditetapkan misi sebagai berikut:

4. peningkatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan dari kekerasan termasuk TPPPO;
5. peningkatan perlindungan anak; dan
6. peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Tujuan adalah penjabaran visi kementerian yang bersangkutan dan dilengkapi dengan rencana sasaran nasional yang hendak dicapai dalam rangka mencapai sasaran program prioritas Presiden (Bappenas, 2014). Perumusan tujuan Kemen PPPA mendasarkan pada RPJMN tahun 2020-2024 dengan memperhatikan tugas dan fungsi Kemen PPPA, dan amanat peraturan perundang-undangan terkait.

Penyusunan tujuan Kemen PPPA perlu memperhatikan Agenda pembangunan nasional. Berdasarkan RPJMN Tahun 2020-2024, terdapat 7 agenda pembangunan nasional yang perlu diperhatikan yaitu sebagai berikut:

1. ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan;
2. pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan;
3. sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing;
4. revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar;
6. lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim; dan
7. stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Kemen PPPA mendukung Prioritas Nasional (PN) ke-3 yaitu "Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing", khususnya Program Prioritas (PP) ke-5 yaitu "Peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda", Kegiatan Prioritas (KP) ke-1 yaitu "Pemenuhan hak dan perlindungan anak", dan Kegiatan Prioritas (KP) ke-2 yaitu "perlindungan

perempuan”. Sasaran nasional yang akan dicapai yaitu meningkatnya kualitas anak, perempuan dan pemuda dengan indikator nasional yang harus dicapai yaitu:

1. Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif
2. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
3. Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif
4. Indeks Perlindungan Anak (IPA)
5. Persentase ARG pada belanja langsung APBD

Penyusunan tujuan Renstra Kemen PPPA juga memperhatikan 5 arahan presiden, yaitu:

1. peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan;
2. peningkatan peran ibu dan keluarga dalam pendidikan/pengasuhan Anak;
3. penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
4. penurunan pekerja anak; dan
5. pencegahan perkawinan anak.

Dimana Indikator kinerja masing-masing tujuan merupakan Indikator Utama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai berikut:

Tabel 3.1  
Indikator Kinerja Utama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan  
Perlindungan Anak Republik Indonesia

No	TUJUAN
	Indikator Kinerja Utama (IKU)
1.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)
2.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
3.	TPAK Perempuan
4.	Indeks PUG Nasional
5.	Indek Perlindungan Anak (IPA)
6.	Proporsi Perempuan berusia 20-24 tahun yang menikah sebelum berusia 18 tahun
7.	Jumlah Kabupaten/Kota dengan peringkat menuju KLA
8.	Prosentasi balita yang mendapatkan pengasuhan tidak layak
9.	Indeks Pembangunan Partisipasi Masyarakat
10.	Indeks Kualitas Keluarga
11.	Prevalensi Perempuan usia 15-64 tahun yang mengalami kekerasan dan TPPO yang mendapat layanan komperenhensip (SPHPN dan Simponi)
12.	Persentase pemula yang menyediakan layanan bagi perempuan korban kekerasan dan TPPO yang sesuai standar
13.	Prevalensi anak 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya (SNPHAR 2018)
14.	Persentase anak korban kekerasan yang mendapat layanan Komperensif (SNPHAR dan Simponi)
15.	Persentase anak berusia 10-17 tahun yang bekerja
16.	Indek Reformasi Birokrasi
17.	Opini BPK atas Laporan Keuangan
18.	Tingkat Maturitas SPIP
19.	Nilai SAKIP

### Sasaran Strategis Kementerian PPPA

Sasaran Strategis adalah kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh Kementerian/Lembaga yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil satu atau beberapa program (Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 5 Tahun 2019). Untuk mengukur keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis Kemen PPPA telah dirumuskan Indikator

Kinerja Sasaran Strategis. Indikator Kinerja Sasaran Strategis adalah alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga (Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 5 Tahun 2019).

Tujuan Kemen PPPA untuk mendukung upaya pencapaian Visi dan Misi Kemen PPPA adalah sebagai berikut:

**1. Meningkatkan Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan**

Sasaran strategis yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah: meningkatnya kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan. Capaian sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja sasaran strategis yaitu 2. Persentase Anggaran Responsif Gender pada Belanja Langsung APBD dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

**2. Meningkatkan Pemenuhan Hak Anak**

Sasaran strategis yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah: meningkatnya kualitas tumbuh kembang anak dan kapasitas kelembagaan pemenuhan hak serta perlindungan khusus anak. Capaian sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja sasaran strategis yaitu Indeks Perlindungan Anak (IPA) dan Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapat Layanan Komprehensif.

**3. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dan Kualitas Keluarga dalam Pembangunan PP PA**

Sasaran strategis yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah: meningkatnya partisipasi masyarakat dan kualitas keluarga dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk mewujudkan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak. Capaian sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja sasaran strategis yaitu Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).

**4. Meningkatkan Perlindungan Hak Perempuan dari kekerasan termasuk TPPO**

Sasaran strategis yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah: menurunnya segala bentuk kekerasan terhadap perempuan di ruang publik, domestik, tempat kerja, situasi darurat kondisi khusus, dan perempuan korban TPPO, serta meningkatnya layanan bagi perempuan korban kekerasan dan TPPO. Capaian sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja sasaran strategis yaitu Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapat Layanan Komprehensif.

**5. Meningkatkan Perlindungan Khusus Anak**

Sasaran strategis yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah: meningkatnya layanan bagi anak korban kekerasan dan yang memerlukan perlindungan khusus. Capaian sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja sasaran strategis yaitu Indeks Perlindungan Anak (IPA) dan Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapat Layanan Komprehensif.

**6. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Kemen PPPA**

Sasaran strategis yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah: meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik di Kemen PPPA.

Capaian sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja sasaran strategis yaitu:

- a. Indeks Reformasi Birokrasi;
- b. Opini BPK atas Laporan Keuangan;
- c. Tingkat Maturitas SPIP; dan
- d. Nilai SAKIP.

**Urusan Pemerintahan Konkuren Berdasarkan UU 23 Tahun 2014 Terkait Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak.**

Urusan pemerintahan konkuren atau urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah. Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Berdasarkan pasal 12 ayat 2 UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak termasuk kedalam urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, dimana pembagian urusan pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.2**  
**Pembagian Urusan Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota**  
**Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

NO	SUB URUSAN	PEMERINTAH PUSAT	DAERAH PROVINSI	DAERAH KABUPATEN / KOTA
1.	Kualitas Hidup Perempuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) pada lembaga pemerintah tingkat nasional</li> <li>- Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat nasional</li> <li>- Standardisasi lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelembagaan PUG pada lembaga pemerintah tingkat Daerah provinsi</li> <li>- Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah provinsi</li> <li>- Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Pemberdayaan perempuan tingkat Daerah provinsi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelembagaan PUG pada lembaga pemerintah tingkat Daerah kabupaten /kota</li> <li>- Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah kabupaten/kota</li> <li>- Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan Perempuan tingkat Daerah kabupaten /kota</li> </ul>
2.	Perlindungan Perempuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup nasional</li> <li>- Penyediaan layanan rujukan akhir bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat nasional, lintas provinsi dan internasional</li> <li>- Standardisasi lembaga penyedia layanan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup Daerah Provinsi dan lintas Daerah Kabupaten / kota</li> <li>- Penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah provinsi dan lintas Daerah kabupaten/kota</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup Daerah kabupaten/kota</li> <li>- Penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah kabupaten/kota</li> </ul>

NO	SUB URUSAN	PEMERINTAH PUSAT	DAERAH PROVINSI	DAERAH KABUPATEN / KOTA
		perlindungan perempuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat Daerah provinsi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat Daerah kabupaten /kota</li> </ul>
3.	Kualitas Keluarga	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak tingkat nasional.</li> <li>- Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak tingkat nasional</li> <li>- Standardisasi lembaga penyediaan layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak tingkat Daerah provinsi dan lintas Daerah kabupaten/kota</li> <li>- Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya lintas Daerah kabupaten/kota</li> <li>- Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya lintas Daerah kabupaten/kota</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak tingkat Daerah kabupaten/kota</li> <li>- Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah kabupaten/kota</li> <li>- Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah kabupaten/kota</li> </ul>
4.	Sistem Data Gender dan Anak	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penetapan sistem data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat nasional</li> <li>- Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data ditingkat Daerah provinsi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data ditingkat Daerah kabupaten/kota</li> </ul>

NO .	SUB URUSAN	PEMERINTAH PUSAT	DAERAH PROVINSI	DAERAH KABUPATEN / KOTA
		kelembagaan data di tingkat nasional		
5.	Pemenuhan Hak Anak (PHA)	- Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, nonpemerintah, dan dunia usaha tingkat nasional	- Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, nonpemerintah, dan dunia usaha tingkat daerah provinsi	- Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha tingkat Daerah Kabupaten /kota

### 3.2 Tujuan dan sasaran Rencana Kerja PD Tahun 2024 PD

#### Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah kondisi yang ingin dicapai dalam rangka mencapai sasaran RPJMD, dengan memperhatikan tugas dan fungsi Dinas PPPA sesuai dengan amanat undang-undang.

Tujuan jangka menengah yang akan dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Hidup Perempuan;
2. Meningkatkan Perlindungan Hak Perempuan;
3. Meningkatkan Kualitas Keluarga;
4. Meningkatkan Pemenuhan Hak Anak;
5. Meningkatkan Kualitas Perlindungan Khusus Anak;
6. Meningkatkan kualitas data gender dan anak.

Tujuan tersebut kemudian dituangkan dalam sasaran strategis Secara rinci tujuan, sasaran, indikator sasaran dan target kinerja sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku .sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan, yang ditandai dengan Indikator Pemberdayaan Gender (IPG) dan Indeks Pembangunan Gender (IDG);
2. Meningkatnya Kualitas Perlindungan terhadap Hak - Hak Perempuan, yang ditandai dengan Indikator Ratio Perempuan Korban Kekerasan, dan Proporsi perempuan korban kekerasan yang mendapat layanan;
3. Meningkatnya Kualitas Keluarga untuk mewujudkan KG dan PHA, yang ditandai dengan Indikator Presentase lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga yang aktif;
4. Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak, yang ditandai dengan Indikator presentase Kabupaten/Kota yang memenuhi kualifikasi layak anak;
5. Meningkatnya Kualitas Perlindungan Khusus Anak, yang ditandai dengan Indikator Cakupan rasio anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu;
6. Meningkatnya kualitas data gender dan anak sebagai basis perencanaan daerah, yang ditandai dengan Indikator Persentase Kabupaten/kota pengelola sistim data gender

## BAB IV

### RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

#### 4.1 Program dan Kegiatan

Dalam rangka mencapai visi, misi dan tujuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku maka pada tahun 2024 disusun program dan kegiatan dengan berpedoman pada Nomenkalur Permendagri 90 Tahun 2019 dengan rincian sebagai berikut :

#### **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

##### **1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,**

**Kegiatan : Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

**Sub Kegiatan :**

- a) Penyusunan Dokumen Perencanaan

**Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

**Sub Kegiatan :**

- a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- b) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

**Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah**

**Sub Kegiatan :**

- a) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- b) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- c) Fasilitas Kunjungan Tamu
- d) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- e) Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

**Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

**Sub Kegiatan :**

- a) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- b) Pengadaan Mebel
- c) Pengadaan Aset Tetap Lainnya

**Kegiatan : Penggandaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

**Sub Kegiatan : Pengadaan Mebel**

**Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

**Sub Kegiatan :**

- a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

c) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

**Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

**Sub Kegiatan :**

- a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- b) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- c) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- d) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

**2. PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**

**Kegiatan : Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi**

**Sub Kegiatan :**

- a) Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi

**Kegiatan : Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi**

**Sub Kegiatan :**

- a) Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi
- b) Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi

**Kegiatan : Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi**

**Sub Kegiatan :**

- a) Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi

**3. PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**

**Kegiatan : Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota**

**Sub Kegiatan :**

- a) Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi

- b) Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi

**Kegiatan : Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota**

**Sub Kegiatan :**

- a) Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi

**Kegiatan : Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi**

**Sub Kegiatan :**

- a) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi

#### **4. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**

**Kegiatan : Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi**

**Sub Kegiatan :**

- a) Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak

**Kegiatan : Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga**

**Sub Kegiatan :**

- a) Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga

#### **5. PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**

**Kegiatan : Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi**

**Sub Kegiatan :**

- a) Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi
- b) Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi

#### **6. PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**

**Kegiatan : Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi**

**Sub Kegiatan :**

- a) Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi
- b) Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi

**Kegiatan : Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi**

**Sub Kegiatan :**

- a) Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi
- b) Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota

**7. PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**

**Kegiatan :**

**Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi**

**Sub Kegiatan :**

- a) Penyediaan Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi
- b) Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi

**4.2 Kegiatan Prioritas Dinas PPPA Provinsi Maluku**

**1. PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**

**Kegiatan : Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi**

**Sub Kegiatan :**

- a) Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi

**Kegiatan : Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi**

**Sub Kegiatan :**

- b) Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi
- c) Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi

**Kegiatan : Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi**

**Sub Kegiatan :**

- d) Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi

**2. PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**

**Kegiatan : Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan**

**para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota**

**Sub Kegiatan :**

- a) Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi
- b) Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi

**Kegiatan : Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota**

**Sub Kegiatan :**

- c) Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi

**Kegiatan : Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi**

**Sub Kegiatan :**

- d) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi

**3. PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**

**Kegiatan :**

**Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi**

**Sub Kegiatan :**

- a) Penyediaan Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi
- b) Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi

Secara rinci Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 selanjutnya dapat di lihat pada tabel T-C.33



Tabel T-C.33

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan PD Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024**  
**PD : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku**

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITANDENGAN PELAYANAN DASAR					PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				7,579,150,975	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7,579,150,975	
2.08.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Presentase Keterlaksanaan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		100	4,767,873,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4,767,873,000	
2.08.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			100	486.809.720	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		486.809.720	
2.8.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		1	486.809.720	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		486.809.720	
2.08.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			100	3,406,867,130	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3,406,867,130	
2.8.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (DINAS PEMBERDAYAAN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			3.390.541.130	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3.390.541.130	

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK								
2.08.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD (DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK)	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		1	19,591,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		19,591,200	
2.8.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			100	<b>147,844,200</b>	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		<b>147,844,200</b>	
2.8.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		12	63,399,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		63,399,200	
2.8.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK)	jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			26,125,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		26,125,000	
2.8.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu (DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK)	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu			58,320,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		58,320,000	
2.8.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100	<b>23,701,500</b>	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		<b>23,701,500</b>	

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.8.01.1.07.05	Pengadaan Mebel (DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK)	jumlah Paket Mebel yang Disediakan		12	23,701,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		23,701,500	
2.8.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100	<b>491,251,950</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>		<b>491,251,950</b>	
2.8.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat (DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		12	9,192,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9,192,000	
2.8.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK)	jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12	75,600,000	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>		75,600,000	
2.8.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12	406,459,950	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		406,459,950	
2.8.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				<b>235,100,000</b>	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		<b>235,100,000</b>	
2.8.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan			86,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		86,000,000	

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK)	Dibayarkan Pajakny							
2.8.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya			41,600,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		41,600,000	
2.8.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK)	jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			15,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		15,000,000	
2.8.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK)	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			92,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		92,500,000	
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN				593,833,138	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		593,833,138	

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	PEREMPUAN								
2.08.02.1.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi				99,822,762	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			99,822,762
2.08.02.1.01.03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi (DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK)	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Provinsi			99,822,762	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			99,822,762
2.08.02.1.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi KeMasyarakatan Kewenangan Provinsi				<b>459,704,530</b>	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			<b>459,704,530</b>
2.08.02.1.02.01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi (DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK)	jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi			57,228,930	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			57,228,930

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.08.02.1.02.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi (DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK)	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mengikuti Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan Di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi Kepada Organisasi Masyarakat di Kabuputaen/Kota			402,475,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		402,475,600	
2.08.02.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi				34,305,846	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		34,305,846	
2.08.02.1.03.03	Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi (DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK)	jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi yang Tersedia			34,305,846	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		34,305,846	
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN 828,766,250 0 0 0 828,766,250				828,766,250	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		828,766,250	
	Pencegahan Kekerasan				499,666,250	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		499,666,250	

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.08.03.1.01	terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota								
2.08.03.1.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi (DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK)	jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi			109,700,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		109,700,000	
2.08.03.1.01.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi (DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK)	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi			389,966,250	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		389,966,250	
2.08.03.1.02	Penyediaan Layanan Rujukan				<b>254,504,000</b>	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		<b>254,504,000</b>	

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota								
2.08.03.1.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi (DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK)	jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi			254,504,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			254,504,000
2.08.03.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi				74,596,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			74,596,000
2.08.03.1.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi (DINAS	Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas			74,596,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			74,596,000

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK)								
<b>2.08.04</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA</b>				<b>175,299,842</b>	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		<b>175,299,842</b>	
<b>2.08.04.1.01</b>					<b>131,025,500</b>	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		<b>131,025,500</b>	
2.08.04.1.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota (DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK)	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota			131,025,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		131,025,500	
<b>2.08.04.1.02</b>	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi				<b>44,274,342</b>	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		<b>44,274,342</b>	
<b>2.08.04.1.02.03</b>	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi (DINAS	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi			44,274,342	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		44,274,342	

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK)								
<b>2.08.05</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK</b>				<b>171,999,045</b>	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		<b>171,999,045</b>	
<b>2.08.05.1.01</b>	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi				<b>171,999,045</b>	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		<b>171,999,045</b>	
2.08.05.1.01.01	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi (DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK)	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia			111,936,315	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		111,936,315	
2.08.05.1.01.02	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi (DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK)	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi			60,062,730	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		60,062,730	
<b>2.08.06</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b>				<b>878,112,950</b>	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		<b>878,112,950</b>	
<b>2.08.06.1.01</b>	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi				650,125,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		650,125,500	
2.08.06.1.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Usaha			350,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		350,000,000	

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi (DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK)	Kewenangan Provinsi yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha							
2.08.06.1.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi (DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK)	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi			300,125,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		300,125,500	
2.08.06.1.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi				227,987,450	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		227,987,450	
2.08.06.1.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi (DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK)	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi			103,598,450	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		103,598,450	

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.08.06.1.02.04	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK)	jumlah Dokumen Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota			124,389,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		124,389,000	
<b>2.08.07</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>				<b>139,565,250</b>	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		<b>139,565,250</b>	
2.08.07.1.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi				<b>139,565,250</b>	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		<b>139,565,250</b>	

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.08.07.1.02.04	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi (DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUN DAN PERLINDUNGAN ANAK)	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi			139,565,250	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		139,565,250	

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, *Community Base Development* (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (Stakeholders) dalam menciptakan *Good Governance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah (*Trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar benar dikedepankan.

Rancangan awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku Utara disusun dalam rangka perwujudan tanggung jawab pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang menjadi tanggung jawabnya. Yang selain menjadi acuan pelaksanaan kegiatan pada tahun 2024 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja. Serta memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana dimasa mendatang.

Dinas PPPA Provinsi Maluku yang bertugas dalam mendorong terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender (KKG), terlindunginya anak memiliki fungsi bukan sebagai pelaksana, melainkan sebagai perumus kebijakan, koordinator pelaksanaan kebijakan, advokator, fasilitator, mediator, dan inisiator dalam mengimplementasikan pengarusutamaan gender (PUG) dan anak (PUHA) di semua Perangkat daerah (PD) dilingkungan pemerintah Provinsi Maluku dan lembaga masyarakat.

Agar setiap PD dan lembaga masyarakat tersebut dapat mengimplementasikan strategi PUG dan PUHA ke dalam setiap kebijakan, program dan kegiatannya yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pemantauan dan evaluasinya, maka tugas akhir yang paling mendasar dari Dinas PPPA Provinsi Maluku adalah mengubah mindset individu dan budaya lembaga dari buta dan bias gender menjadi sadar, sensitif, peduli, dan tanggap (responsif) gender, dan dari tidak peduli terhadap hak anak menjadi peduli anak

Oleh karena itu, indikator outcome, terlebih lagi indikator dampak (*impact*) dari capaian layanan Dinas PPPA membutuhkan usaha dan komitmen dari seluruh stakeholder. Keberhasilan Dinas PPPA Provinsi Maluku pada hakekatnya tersebar sebagai bagian dari keberhasilan Organisasi Perangkat Daerah dan lembaga masyarakat dalam mengintegrasikan ataupun mempertimbangkan isu gender, perempuan dan anak ke dalam kebijakan, program, dan kegiatannya.